

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Kurikulum

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen merupakan suatu ilmu dan kaidah tersendiri, karena manajemen telah diteliti dan mempunyai sejumlah gagasan yang perlu dievaluasi dan dikembangkan, maka manajemen dipandang sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai suatu ilmu. Seseorang yang melakukan manajemen disebut dengan manajer. Manajer dianggap sebagai suatu profesi karena memerlukan keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang manajer dan manajemen juga dipandang sebagai suatu seni, pasalnya seorang manajer harus memahami cara memimpin anggota, yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam suatu organisasi maupun yang ada di lembaga pendidikan. Sehingga seorang manajer harus memiliki keahlian khusus yang harus dimiliki dan dituntut untuk bekerja secara profesional serta mampu meningkatkan profesionalitasnya.¹

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata *to manage*, yang berarti mengatur.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen artinya pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.³ Adapun secara terminologi, manajemen artinya proses pelaksanaan aktifitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan orang lain.⁴

Manajemen adalah suatu ilmu atau ketrampilan yang berisi mengatur (planning), memilah (organizing), mengaktualisasikan (actuating) dan mengendalikan (controlling)

¹ Tati Mulyani, Edi Harapan, dan Nila Kesumawati, “*Management Teachers in the Implementation of Learning Process In The Industrial Revolution 4.0*,” *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 1 (4 Februari 2022): 22–25, <https://doi.org/10.52690/jswe.v3i1.267>.

² Tony Bush, dan Marianne Coleman, *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*, (diterjemahkan oleh Fahrurrozi), 8.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 979.

⁴ Mohammad Zaini, *Manajemen kurikulum terintegrasi: kajian di pesantren dan madrasah*, Cetakan I (Bantul, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021). 38.

dalam menyelesaikan segala urusan dengan menggunakan segala sumber daya yang ada melalui orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵ Sedangkan menurut Terry sebagaimana dikutip oleh M. Nasir dan M. Khairul Rijal, menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.⁶

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Chusnul Chotimah yang menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai suatu target yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan langkah dan tahapan yang jelas. Adapun tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang manajer adalah *planning, organizing, leading, dan controlling*. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.⁷

Adapun kurikulum secara bahasa merupakan disiplin ilmu yang diajarkan di lembaga pendidikan. *Curriculum* merupakan kata dasar dari kurikulum yang diserap kedalam kata Bahasa Indonesia yang awalnya berarti jalur lari. Selain itu, kurikulum juga bisa dipadankan dengan *courier* yang dalam Bahasa Perancis berarti lari.

Pendapat lain mengatakan bahwa segala aturan, rencana, dan kegiatan pembelajaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai target yang telah dicanangkan untuk meraih tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan itulah kurikulum, menurut Soedijarto yang dikutip oleh Mohammad Zaini.⁸

2. Prosedur Manajemen Kurikulum

Prosedur adalah suatu kegiatan penyelesaian suatu pekerjaan dengan pola, waktu, cara kerja yang tetap dan telah

⁵ Wiji Hidayati, dkk., *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan Konsep dan Strategi Pengembangan*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 1.

⁶ M. Nasir, dan M. Khairul Rijal, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, (Samarinda: CV. BO' Kampung Publishing, 2020), 1.

⁷ Chusnul Chotimah, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2022), 21.

⁸ Mohammad Zaini, *Manajemen Kurikulum Terintegrasi*. 15.

ditentukan. Praktik dalam prosedur manajemen kurikulum melalui beberapa tahap, meliputi:⁹

a. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan menurut Kauffman, sebagaimana dikutip oleh M. Nasir dan Rijal, adalah kegiatan penetapan tujuan atas suatu pekerjaan yang akan dicapai dan menetapkan langkah-langkah meraih tujuan tersebut secara efektif dan efisien.¹⁰ Menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Zaini, perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Hamalik menjelaskan bahwa suatu rencana yang baik termasuk juga rencana kurikulum terdiri dari lima unsur:¹¹

- 1) Kejelasan tujuan yang telah dirumuskan.
- 2) Menyeluruh serta komprehensif, namun tidak rancu bagi warga sekolah
- 3) Terfokus pada target dan tujuan yang ditentukan diawal
- 4) Bersifat ekonomis dan menyesuaikan sumber daya yang ada.
- 5) Tidak kaku, artinya terdapat kemungkinan untuk berubah.

b. Pengorganisasian Kurikulum

Langkah setelah perencanaan kurikulum yaitu adalah pengorganisasian kurikulum. George R. Terry sebagaimana dikutip oleh Wiji, mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah suatu langkah dalam mengelola, mengatur, dan mensinkronkan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi agar bisa bekerja sesuai rencana dan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian diatas merupakan penjelasan pengorganisasian dalam kaitannya pengertian

⁹ A. Rusdiana dan Elis Ratna Wulan, *Manajemen Kurikulum: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*, (Bandung: ARSAD PRESS, 2021), 33-34.

¹⁰ M. Nasir, dan M. Khairul Rijal, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, 22.

¹¹ Mohammad Zaini, *Manajemen Kurikulum Terintegrasi*. 42.

manajemen secara umum.¹²

Pengorganisasian kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu: 1) kurikulum mata pelajaran, yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran secara terpisah; 2) kurikulum bidang studi, yang mengfungsikan beberapa mata pelajaran sejenis; 3) kurikulum integrasi, yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu; 4) *core curriculum*, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.¹³

c. Penyusunan Staf

Pendapat Hamalik yang dikutip oleh Agustinus menerangkan bahwa penyusunan staf (*staffing*) adalah kegiatan yang bertujuan menyediakan orang-orang untuk melaksanakan suatu target dan tujuan yang harus dilaksanakan. Pendapat Hamalik selanjutnya, menyatakan bahwa *staffing* idealnya dilaksanakan setelah perencanaan ditetapkan sebelumnya. Penyusunan staf pada bakikatnya meliputi: pencarian SDM, seleksi, pemanggilan, penempatan, pelatihan, penilaian dan kompensasi.¹⁴

d. Kontrol kurikulum

Menurut Hamalik dalam buku karya Agustinus, pengontrolan kurikulum adalah proses peninjauan kembali terhadap program yang sudah berjalan untuk mengetahui seberapa efektif program telah berjalan dan sejauh mana tujuan telah tercapai. Pengertian lainnya adalah, apakah suatu program yang berjalan dengan tujuan yang sudah ditargetkan bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁵

3. Prinsip Manajemen Kurikulum

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum berdasarkan kajian Tim Dosen Adpen UPI yang dikutip oleh Rusdiana dan Elis

¹² Wiji Hidayati, dkk., *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan Konsep dan Strategi Pengembangan*, 94-95.

¹³ Wiji Hidayati, dkk., *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan Konsep dan Strategi Pengembangan*, 95-96.

¹⁴ Agustinus Hermino, *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter Konsep, Pendekatan dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 38-39.

¹⁵ Agustinus Hermino, *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter Konsep, Pendekatan dan Aplikasi*, 39-40

adalah:¹⁶

- a. Produktivitas, diharapkan manajemen kurikulum dapat membuat peserta didik mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Sehingga peserta didik dapat produktif dalam belajar dan menyelesaikan tahap pendidikannya.¹⁷
- b. Demokratisasi, dalam proses manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi sehingga dapat menempatkan antara pengelola lembaga, pelaksana dan peserta didik pada tempat yang sesuai dan saling mengisi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. Kooperatif, kaitanya dalam usaha mencapai tujuan kurikulum yang diharapkan perlu adanya kerjasama antar semua *stakeholder*. Kerjasama harus terjain secara positif dan berkembang.
- d. Efektifitas dan efisiensi, tahapan dalam proses manajemen kurikulum harus mengedepankan prinsip efektif dan efisien, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut tidak memakan banyak biaya dan waktu dan memberikan hasil yang baik.
- e. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan, yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.¹⁸

Menurut E Mulyasa, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, sehingga memudahkan dalam operasional tujuan dan serta sesuai langkah-langkah yang dikembangkan.
- b. Fleksibilitas dan kesederhanaan program.
- c. Kesesuaian antara program-program yang direncanakan dengan tujuan yang hendak diraih.
- d. Program yang diterapkan harus menyeluruh dan jelas

¹⁶ A. Rusdiana dan Elis Ratna Wulan, *Manajemen Kurikulum: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*, 30-31.

¹⁷ Tati Mulyani, Edi Harapan, dan Nila Kesumawati, "Management Teachers in the Implementation of Learning Process In The Industrial Revolution 4.0," *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 1 (4 Februari 2022): 22–25, <https://doi.org/10.52690/jswse.v3i1.267>.

¹⁸ M. Nasir, dan M. Khairul Rijal, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, 15-16.

pencapaiannya.

- e. Komunikasi antar pelaksana program harus berjalan dengan baik.¹⁹

4. Fungsi Manajemen Kurikulum

Proses manajemen kurikulum harus tertata dengan baik agar tahap perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara optimal. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum, diantaranya:²⁰

- a. Terjadinya peningkatan efisiensi sumberdaya kurikulum melalui pengelolaan dan perencanaan yang efektif.
- b. Meningkatkan hasil serta kemampuan pada siswa, yang dapat dicapai peserta didik melalui pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas..²¹
- c. Menghasilkan bentuk pembelajaran yang relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik.
- d. Guru mampu bekerja lebih efektif dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- e. Proses kegiatan belajar dan mengajar bisa lebih terarah dan konsisten. Sehingga, ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat dihindarkan.²²
- f. Menjadikan masyarakat turut terlibat dalam proses pengembangan kurikulum karena kurikulum-kurikulum yang dikelola secara baik akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam kegiatan belajar atau sumber belajar dapat disesuaikan kondisi masyarakat setempat.

Dari penjelasan fungsi manajemen kurikulum diatas dapat dijabarkan fungsi kurikulum itu sendiri adalah sebagai berikut:²³

- a. Fungsi kurikulum terhadap guru, ialah sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Guru dalam pelaksanaan pembelajarannya memiliki pedoman yang terukur dan

¹⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 40.

²⁰ Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan di Era Merdeka Belajar*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 44-46.

²¹ A. Rusdiana dan Elis Ratna Wulan, *Manajemen Kurikulum: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*, 26-27.

²² Din Wahyudin, "Manajemen Kurikulum", (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), 20.

²³ Wiji Hidayati, dkk., *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan Konsep dan Strategi Pengembangan*, 6-7.

sistematis yang diperoleh dari adanya kurikulum. Menjadikan pembelajaran lebih terarah, terukur serta menjadikan peserta didik lebih efektif.

- b. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Penyusunan kalender sekolah, pengajuan sarana-parasarana sekolah kepada komite sekolah, penyusunan berbagai kegiatan sekolah baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lainnya didasarkan pada kurikulum yang digunakan.
- c. Fungsi kurikulum bagi pengawas adalah sebagai acuan dalam melakukan kegiatan supervisi ke sekolah.
- d. Fungsi kurikulum bagi orang tua peserta didik, adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran serta materi yang dipelajari. Selain itu sebagai bahan acuan dalam mendukung kegiatan sekolah ataupun pemberian saran dan kritik yang membangun.
- e. Bagi peserta didik, kurikulum berguna sebagai petunjuk arah belajar. Melalui kurikulum, peserta didik dapat memahami apa tujuan yang harus diraih, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.²⁴

B. Kurikulum Dalam Perspektif Islam

Agama Islam sangat mengutamakan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahkan didalam suatu keterangan hadis nabi menerangkan semua orang islam baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil atau dewasa itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa agama islam sangat mengedepankan umat islam untuk memiliki pengetahuan yang luas. Al-quran sebagai sumber pendidikan dalam Islam memiliki arti dan konsep yang sangat jelas. Konsep pendidikan islam dalam Al-Quran ini tetap berlaku dan relevan untuk diaplikasikan dan menjawab problematika zaman.²⁵

Manajemen kurikulum merupakan salah satu usaha dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, penerapan dan pengawasan untuk mencapai pembinaan sumber daya manusia. Terkait dengan proses implementasi manajemen kurikulum dalam perspektif Islam

²⁴ Khusnul Wardan dan Anik Puji Rahayu, *Manajemen Kurikulum*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 7.

²⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 17.

kita dapat melihatnya dari sejarah perkembangan Islam yang berpengaruh terhadap sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam terbagi kedalam empat periode,²⁶ yaitu:

1. Periode pembinaan, periode ini diawali sejak diterimanya wahyu pertama oleh Nabi Muhammad hingga akhir masa kekuasaan Bani Umayyah (610-750).
2. Periode keemasan, pada periode keemasan ini pendidikan Islam berkembang sangat pesat. Periode ini diawali sejak berakhirnya Bani Umayyah (lahirnya Bani Abbasiyyah) sampai jatuhnya Baghdad dengan kedatangan Mongol (750-1258M).
3. Periode kejatuhan dan kemunduran, dimulai dengan Imperium Turki Usmani hingga kemerdekaan Negara-negara Islam (1251-1800M).
4. Periode pembaharuan dan pembinaan kembali, dari kemerdekaan negara-negara Islam dan Imperium Turki Usmani hingga sekarang (1800 sekarang).

Setiap periode perkembangan yang telah disebutkan memiliki coraknya tersendiri. Lahirnya madrasah pada periode keemasan menjadi salah satu bukti kemajuan sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam selalu berkembang yang dari awalnya hanya diselenggarakan di rumah-rumah sampai kepada *kuttab* dan masjid-masjid. Manajemen kurikulum *kuttab* masih bersifat sederhana yang berupa tulis-baca, hafalan Alquran, dan pokok-pokok ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab, muncul ide pembaharuan *kuttab*. Umar mengintruksikan agar anak-anak di *kuttab* diberikan materi pelajaran berenang, mengendarai kuda, memanah, dan tata bahasa Arab. Akan tetapi instruksi Umar tidak semua dilaksanakan pada tiap *kuttab* karena pada tiap *kuttab* situasinya berbeda. Berenang misalnya, hanya dapat dilaksanakan pada *kuttab* yang tempatnya berada ditepi sungai, seperti *kuttab* di Irak dan Mesir.²⁷

Sedangkan manajemen kurikulum yang dikembangkan madrasah pada awalnya, hanya meliputi ilmu-ilmu agama, dengan hukum Islam (*fiqh*) dan teologi Islam (*kalam*) sebagai studi pokoknya. Seiring dengan kemajuan peradaban Islam, di madrasah kemudian dikembangkan pula kajian tentang ilmu-ilmu rasional, seperti berhitung, sejarah sastra, dan lain-lain. Selanjutnya

²⁶ Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

²⁷ Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam*, 7-8.

manajemen kurikulum dapat dikategorikan menjadi ilmu-ilmu agama; seperti *fiqh*, kalam, sastra Arab, dan lain-lain. Ilmu-ilmu rasional seperti ilmu-ilmu kealaman yang meliputi filsafat, matematika dan kedokteran.²⁸ Madrasah merupakan titik awal dari kebangkitan dan kemapanan sistem pendidikan Islam. Tetapi, karena lembaga-lembaga pendidikan Islam pendahulunya (*kuttab*, masjid) dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan umat Muslim, maka kelahiran madrasah agaknya menjadi keharusan historis demi terwujudnya sistem kelembagaan pendidikan Islam yang profesional. Manajemen kurikulum dan metode pendidikan Islam (Tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran, terdapat dua metode pengajaran di madrasah, yakni debat tertulis (*ta'liqah*) dan debat (lisan)²⁹ yang ada di dalamnya dikembangkan dan disesuaikan agar dapat ikut berperan bagi kemajuan peradaban Islam. Madrasah abad pertengahan sesungguhnya merupakan sistem kelembagaan pendidikan Islam yang lengkap (*fulfill education system*). Dari madrasah pula kemudian dikembangkan konsep *al-jami'ah* seperti yang sekarang dikenal dengan universitas.³⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sejak dari awal kelahirannya sudah menunjukkan adanya proses manajemen kurikulum dengan corak dan karakter tersendiri yang semula sederhana hingga akhirnya begitu kompleks. Pendidikan Islam terbukti berkembang dibuktikan dengan adanya proses pendidikan awalnya hanya diadakan di rumah-rumah sampai kepada *kuttab* dan masjid-masjid, madrasah sampai al-jamiah. Hal ini disebabkan karena Islam mengatur dan mendorong umatnya untuk mencari dan menguasai ilmu sehingga umat islam memiliki pengetahuan dalam menjalani kehidupannya.

C. Sejarah Kurikulum di Indonesia

Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013, 2020. Adapun paparan tentang sejarah perkembangan kurikulum yaitu:

28 Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam*, 16.

29 Sharles Stanton, "*Higher learning in Islam: The Classical Period*", AD 700-1300, (Maryland: Rowman & Littlefield, 1990).

30 Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian Atas Lembaga-Lembaga Pendidikan*, (Bandung: Mizan, 1994), 45.

1. Kurikulum 1947 “Rentjana Pelajaran 1947”

Kurikulum 1947 muncul pada masa kemerdekaan, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut “*leer plan*” artinya rencana pelajaran, dan istilah *curriculum* dalam bahasa Inggris kurang familiar dikalangan masyarakat. Karakter dalam kurikulum ini adalah bersifat politisi karena kiblat dari kurikulum ini adalah mengacu kepada pendidikan zaman kolonial. Diketahui bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat tidak menyeluruh. Sekolah-sekolah hanya menerima siswa dari bagi anak-anak belanda dan anak pejabat. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priyai.³¹ Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme.³²

2. Kurikulum 1952 “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”

Kurikulum 1952 merupakan hasil evaluasi dan perbaikan pada kurikulum sebelumnya yang telah berjalan di Indonesia. Kurikulum ini relatif sama dengan kurikulum sebelumnya yaitu belum menggunakan istilah kurikulum, namun perbedaannya pada kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian di beri nama “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”. Selain itu, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950 ini.³³

3. Kurikulum 1964 Rentjana Pendidikan 1964

Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rentjana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan pemecah masalah (*problem solving*) terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara

³¹ Arif Munandar, *Pengantar kurikulum*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), 50.

³² Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi 1947-2013*, (Jakarta : Kencana, 2019), 46-47.

³³ Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum 48.*

belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin.³⁴

4. Kurikulum 1968

Sifat politis melekat erat pada awal munculnya kurikulum 1968, mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan “Orde Lama”. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama lebih di tekankan pada kurikulum 1968.³⁵

5. Kurikulum 1975

Pembangunan nasional melatarbelakangi kelahiran kurikulum 1975 akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, terutama sejak tahun 1969. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi program maupun kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pembaharuan tersebut. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Kurikulum 1975 berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 banyak mendapatkan kritik dari pelaksana di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.³⁶

6. Kurikulum 1984 Kurikulum 1975 yang Disempurnakan

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinamakan aktif *learning* karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun banyak sekolah yang menerapkan dengan

³⁴ Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum* 51.

³⁵ Muhammad Nurhalim, *Analisis Perkembangan Kurikulum Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain Dan Pendekatan)*, Jurnal INSANIA Vol.16, No.3 September-Desember 2011

³⁶ Muhammad Nurhalim, *Analisis Perkembangan Kurikulum Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain Dan Pendekatan)*....55

kurang baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas.³⁷

7. Kurikulum 1994 (Separate Subject Curriculum)

Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

8. Kurikulum 2004, “KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)”

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah suatu konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab.³⁸

9. Kurikulum 2006, (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP, maka dari itu KTSP sering di sebut dengan KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang melekat pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum yakni yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Sekolah (KBS). KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi dan penambahan dari standar yang sudah di buat pemerintah, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan sampai pengembangan silabus.³⁹

³⁷ Alhamuddin, *Sejarah Kurikulum Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum, Jurnal, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.*

³⁸ Hari Suderajat, *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*, (Bandung: CV Cipta Cekas Grafika, 2004), 6.

³⁹ Alhamuddin, *Sejarah Kurikulum Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum, Jurnal, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014*

10. Kurikulum 2013

Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi maka KTSP harus segera dirubah menjadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Sejarah yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi kurikulum ini adalah peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tapi isi dan arah pengembangan pembelajaran masih memiliki keberhasilan, karakteristik dalam paket kompetensi yang ada pada KTSP yang memiliki kesamaan juga dengan karakteristik kurikulum KBK. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter, dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anak didik secara holistik. Kompetensi pengahuan, ketrampilan dan sikap ditentukan oleh rapor dan merupakan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan anak didik.⁴⁰

11. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Titik tekan pada kurikulum ini adalah proyek penguatan pelajar Pancasila yang merupakan hasil evaluasi dari adanya Covid 19. Kurikulum ini lah yang akan penulis bahas.

D. Kurikulum Merdeka

1. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia

⁴⁰ Maas Shobirin, *Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 39-40.

Maju. Kurikulum merdeka ini di terbitkan berdasarkan, penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 bahwa siswa Indonesia memiliki kelemahan dalam bidang numerasi dan literasi. Berdasarkan penelitian tersebut posisi Indonesia hanya menempati posisi ke 74 dari 79 negara.⁴¹

Kurikulum Merdeka telah ditetapkan pemerintah sebagai penerus dari Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat. Kurikulum ini akan diterapkan secara keseluruhan setelah evaluasi K-13. Kurikulum Merdeka menawarkan berbagai kesempatan belajar, baik secara intrakurikuler maupun ko-kurikuler dengan materi yang sesuai untuk memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan memantapkan keterampilannya. Guru dapat memilih sumber belajar yang berbeda selama proses pengajaran untuk menyesuaikan pengajaran dengan minat dan kebutuhan siswa mereka.⁴² Selain itu terdapat proyek kurikulum merdeka untuk mendukung pencapaian profil pelajar pancasila termasuk dalam kurikulum ini. Selanjutnya dirumuskan sesuai tema tertentu yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan proyek berdiri sendiri sesuai temanya dan tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran dalam kelas, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.⁴³

Merdeka belajar merupakan hal inti dari kurikulum merdeka. Disebut merdeka belajar karena siswa bisa memilih dan mendalami materi sesuai keinginan, hobi, minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, dalam suatu kelas tentunya terdapat anak dengan minat dan bakat yang berbeda, hal ini bisa menjadi perhatian guru untuk memberikan pembelajaran secara diferensial, sehingga anak tidak dipaksakan belajar suatu hal yang tidak disukai. Pasalnya yang selama ini terjadi dalam

⁴¹ Anita Jojor dan Hotmaulina Sihotang, “*Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis STUDI MULTI KASUS Kebijakan Pendidikan)*,” *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 4 (3 Juni 2022): 5150–61, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106>.

⁴² Yuni Pratikno, dkk., “*Human Resource ‘Kurikulum Merdeka’ from Design to Implementation in the School: What Worked and What not in Indonesian Education. Jurnal Iqra’ : Kajian Ilmu Pendidikan*,” 7, no. 1. (2022): 326-343, <https://doi.org/10.25217/ji.v7i1.1708>

⁴³ Nadhiroh, *MERDEKA BELAJAR dalam Mencapai Indonesia Maju 2045*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2020), 5.

dunia pendidikan adalah semua anak dipukul rata dalam kegiatan belajar sehingga tolok ukur penilaian juga sama. Hal ini lah yang dievaluasi dan dibenahi dengan kurikulum merdeka..⁴⁴

2. Tujuan Kurikulum Merdeka

Beberapa faktor yang menjadi poin penekanan pada kurikulum merdeka, yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya untuk membenahi keadaan pendidikan di Indonesia yang tertinggal dengan negara lainnya dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Terdapat tujuan lain diterapkannya Kurikulum Merdeka dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu:

- a. Menjadikan proses belajar yang lebih menyenangkan.
Banyak siswa menganggap kegiatan belajar adalah suatu hal yang membosankan sehingga beberapa siswa lebih memilih tidak mengikuti jam pelajaran. Maka untuk mengubah keadaan yang seperti ini, dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu kurikulum merdeka agar pendidikan lebih menyenangkan bagi siswa maupun guru, karena kurikulum memiliki penekanan merdeka belajar yang mengutamakan pengembangan aspek keterampilan dan karakter serta tidak monoton hanya pembelajaran materi di kelas saja.
- b. Mengejar ketertinggalan pembelajaran
Seperti yang telah diketahui bahwa pandemi Covid-19 telah banyak mempengaruhi manusia dalam berbagai aspek, tidak hanya aspek kesehatan saja, melainkan juga memberi pengaruh pada aspek pendidikan. Selama pandemic, pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan pembelajaran daring sehingga membuat siswa lepas pengawasan dari guru dan orang tua pun jua tidak maksimal dalam mendampingi putra-putrinya. Selain itu, dibandingkan dengan negara lain, pendidikan di Indonesia juga cukup tertinggal jauh. Oleh karena itu, salah satu tujuan Kurikulum Merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran di Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Direktorat KSKK Madrasah, *Panduan Pengembangan P5 dan PRA*, (Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2022), 5.

⁴⁵ Khoirurrijal, dkk., *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, (2022) 8-9.

- c. Mengembangkan potensi peserta didik
Kurikulum ini dibuat dengan sederhana dan fleksibel dan lebih mengutamakan pada karakter serta pengembangan potensi kemampuan siswa. Materi pelajaran pada kurikulum ini juga lebih sederhana dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fase-fasenya.⁴⁶ Sehingga guru mampu mengolah dan berkreasi dalam menyampaikan materi sesuai dengan perbedaan minat bakat siswanya.
3. Landasan Kurikulum Merdeka
Landasan kebijakan pengembangan Kurikulum Merdeka dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.⁴⁷
 - b. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022: Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) konsep keilmuan, dan 3) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.
 - c. Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022: Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat tiga opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur Kurikulum Merdeka,

⁴⁶ Nurul Hikmah, *Kurikulum Merdeka Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, (Tangerang Selatan: Bait Qur'any Multimedia, 2022), 25-27.

⁴⁷ A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, 4-5.

- aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru.
- d. Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022: Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka. Memuat Capaian Pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur Kurikulum Merdeka.
 - e. Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022: Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila.⁴⁸
4. Prinsip Pengembangan Kurikulum Merdeka
- Pengembangan kurikulum dalam implementasi kurikulum merdeka berpegang pada beberapa prinsip, diantaranya: 1) Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan, 2) Fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik, 3) Fleksibel: 4) Selaras: 5) Bergotong royong: dan 6) Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.⁴⁹
- a. Prinsip sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan.
- Kemudahan dan kesederhanaan dalam penerapan kurikulum merdeka sangat penting adanya, sebab kurikulum merdeka ini akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang wilayahnya luas dan memiliki karakter masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga dalam implementasinya bisa dilaksanakan dengan mudah dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masing-masing tingkatannya. Beberapa poin penting berkaitan dengan prinsip ini adalah, diantaranya: a) Kebijakan yang baik pada peraturan sebelumnya tetap dipakai. b) Perencanaan yang terarah dan terukur. c) Berbagai opsi dan bantuan dalam penerapan kurikulum.⁵⁰

⁴⁸ I Putu Tedy Indrayana, dkk, *Penerapan Strategi dan Model Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar*, (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022). 51-52.

⁴⁹ Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan di Era Merdeka Belajar*, 78-81

⁵⁰ Aeni Rahmawati, *Manajemen Kurikulum*, (Cirebon: LovRinz Publishing, 2021), 8.

- b. Prinsip fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik.
Kurikulum merdeka menjadikan materi pelajaran yang dipelajari lebih sedikit jumlahnya, dan diambil hanya pada materi esensial saja agar pembelajaran dapat lebih fokus dan berkualitas. Beberapa poin penting berkaitan dengan prinsip ini, diantaranya: a) Memilah pada materi esensial. b) Peserta didik menjadi puasat dalam pembelajaran. c) Kompetensi minimum menjadi target yang dicapai oleh peserta didik. d) Penekanan literasi dan numerasi
- c. Prinsip fleksibel.
Fleksibilitas pada kurikulum merdeka ini memberikan ruang kepada guru dalam menentukan proses kegiatan belajar mau dibuat seperti apa. Prinsip fleksibel ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 37, dinyatakan bahwa Kemendikbudristek hanya menetapkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum, sementara satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengolah, menambah atau memilih materi pelajaran, serta menerapkan kurikulum dengan perbedaan peserta didik, visi misi satuan pendidikan, serta keadaan budaya masyarakat. Fleksibilitas ini diperlukan, sehingga kurikulum yang diterapkan pada peserta didik akan terus berlaku dan dapat dirubah sesuai dengan dinamika lingkungan, isu-isu kontemporer, serta kebutuhan belajar peserta didik.⁵¹
- d. Prinsip selaras.
Kurikulum merdeka tidak boleh menimbulkan salah persepsi dan kesalahan pemahaman. Berkaitan dengan hal itu, kurikulum merdeka ini memiliki kesesuaian dengan tiga hal, diantaranya yaitu: 1) Kesesuaian antara rancangan kurikulum, penerapan kurikulum, proses belajar, dan asesmen. 2) Kesesuaian antara kompetensi guru, sistem tata kelola dan kurikulum. 3) Kesesuaian antara kurikulum dengan kebijakan yang mengatur

⁵¹ Khoirurrijal, dkk., *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 83.

- pendidikan dari jenjang paling bawah hingga perguruan tinggi.⁵²
- e. Prinsip bergotong-royong.
Kurikulum merdeka dirancang berdasarkan prinsip gotong royong artinya proses perencanaan dan pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang kompleks, tidak hanya proses ilmiah melainkan juga politik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan gotong royong dari berbagai pemangku kebijakan termasuk dari berbagai Kementerian, universitas, guru dan peserta didik dalam merancang kurikulum.⁵³
- f. Prinsip memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.
Kurikulum hendaknya direncanakan dengan mempertimbangkan informasi dan data yang terukur sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait bisa menjadikan acuan dan memberikan arahan tentang kebijakan kurikulum yang akan diterapkan di Indonesia. Tidak hanya dibutuhkan pada saat perancangan kurikulum di awal, melainkan hasil kajian tersebut juga dibutuhkan ketika kurikulum sudah diimplementasikan dalam konteks yang lebih nyata. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi kurikulum yang mengarah pada perubahan dan kebaikan menyesuaikan dengan kajian-kajian yang dilakukan. Evaluasi kurikulum ini berfungsi untuk memperoleh umpan balik tentang pelaksanaan, manfaat dan kesesuaian dokumen-dokumen kurikulum terhadap kondisi di lapangan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh berbagai unsur seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan serta pakar-pakar melalui forum komunikasi. Hasil dari umpan balik ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada revisi dokumen-dokumen kurikulum, seperti: prota, prosem, perhitungan minggu efektif, capaian pembelajaran, buku teks, bahan ajar, contoh alur tujuan pembelajaran, serta panduan-panduan dan dokumen lainnya.

⁵² Khoirurrijal, dkk., *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 84.

⁵³ Khoirurrijal, dkk., *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 84.

5. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Terdapat karakter khusus pada kurikulum merdeka yang membedakan kurikulum terbaru ini dengan kurikulum sebelumnya. Setidaknya ada empat karakteristik khusus yang terdapat pada kurikulum merdeka. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter menggantikan Ujian Nasional. Asesmen ini dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11 selain itu asesmen tidak digunakan sebagai syarat kelulusan, melainkan hanya untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerik siswa. Berbeda dengan UN yang menjadi syarat kelulusan dan dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan. Hasil dari asesmen ini diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.⁵⁴

Kedua, sekolah diberikan kewenangan secara penuh dalam menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah, mulai dari bentuk penilaian, soal, dan penugasan lainnya. Sehingga tidak ada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Ketiga, perangkat pembelajaran yang disederhanakan. Seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disederhanakan menjadi satu halaman. Diharapkan waktu guru yang awalnya habis untuk pembuatan perangkat pembelajaran bisa lebih luang dan dialihkan untuk peningkatan pembelajaran anak.⁵⁵

Keempat, pemerataan siswa dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi dan diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Akan tetapi bagi peserta didik jalur prestasi dan afirmasi, diberikan keleluasaan yang lebih banyak dari sistem PPDB dengan kuota yang terbatas. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

6. Struktur Kurikulum untuk SD dalam Kurikulum Merdeka

Terdapat perbedaan struktur kurikulum pada Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Pada Kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu:⁵⁶

⁵⁴ Nadiroh, *Merdeka Belajar*, 44-46

⁵⁵ I Putu Tedy Indrayana, dkk, *Penerapan Strategi dan Model Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar*, 80.

⁵⁶ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 262/M/2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022,

- a. Pembelajaran intrakurikuler.
Kegiatan pembelajaran intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran dalam kelas yang isinya adalah kegiatan penyampaian materi untuk setiap mata pelajaran yang harus mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan diluar mata pelajaran dan tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Kegiatan ini untuk menguatkan upaya dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Pemerintah mengatur alokasi waktu belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) per tahun. Satuan pendidikan dapat menyesuaikan alokasi waktu setiap minggunya secara mandiri dan fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran.⁵⁷

Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel, melalui 3 (tiga) pilihan sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain;
- b. Mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau
- c. Mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar pendidikan menengah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Struktur Kurikulum SD/MI

Struktur kurikulum SD/MI dibagi menjadi 3 (tiga) Fase:

- 1) Fase A untuk kelas I dan kelas II;
- 2) Fase B untuk kelas III dan kelas IV; dan

Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

⁵⁷ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 262/M/2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022, Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

⁵⁸ Khoirurrijal, dkk., *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 84.

3) Fase C untuk kelas V dan kelas VI.

SD/MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD/MI terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁵⁹

- 1) Pembelajaran intrakurikuler; dan
- 2) Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% (dua puluh persen) beban belajar per tahun.

Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama.⁶⁰

Tabel 2.1. Alokasi waktu mata pelajaran SD/MI kelas I
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intra Per-Tahun (Minggu)	Alokasi P5 Per-Tahun	Total JP Per-Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Budha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama	108 (3)	36	144

⁵⁹ Khoirurrijal, dkk., *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 84-85.

⁶⁰ Khoirurrijal, dkk., *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 85-86.

Khonghucu dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Pancasila	144 (4)	36	180
Bahasa Indonesia	216 (6)	72	288
Matematika	144 (4)	36	180
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36	144
Seni dan Budaya**: 1) Seni Musik 2) Seni Rupa 3) Seni Teater 4) Seni Tari	108 (3)	36	144
<i>Bahasa Inggris</i>	72 (2) ***	-	72 ***
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) ***	-	72 ***
Total ****	828 (23)	252	1080

Tabel 2.2. Alokasi waktu mata pelajaran SD/MI kelas II
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intra Per-Tahun (Minggu)	Alokasi P5 Per-Tahun	Total JP Per-Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Budha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila	144 (4)	36	180
Bahasa Indonesia	252 (7)	72	324
Matematika	180 (5)	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36	144
Seni dan Budaya**:	108 (3)	36	144

Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari			
Bahasa Inggris	72 (2) ***	-	72 ***
Muatan Lokal	72 (2) ***	-	72 ***
Total ****	900 (25)	252	1152

Tabel 2.3. Alokasi waktu mata pelajaran SD/MI kelas III-V
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intra Per-Tahun (Minggu)	Alokasi P5 Per-Tahun	Total JP Per-Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Budha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36	144
Pendidikan Pancasila	144 (4)	36	180
Bahasa Indonesia	216 (6)	36	252
Matematika	180 (5)	36	216
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	180 (5)	36	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36	144
Seni dan Budaya**: Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari	108 (3)	36	144

Bahasa Inggris	72 (2) ***	-	72 ***
Muatan Lokal	72 (2) ***	-	72 ***
Total ****	1044 (29)	252	1296

Tabel 2.4. Alokasi waktu mata pelajaran SD/MI kelas VI
(Asumsi 1 Tahun = 32 minggu dan 1 JP = 35 menit)

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per-Tahun (Minggu)	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per-Tahun	Total JP Per-Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Budha dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	96 (3)	32	128
Pendidikan Pancasila	128 (4)	32	160
Bahasa Indonesia	192 (6)	32	224
Matematika	160 (5)	32	192
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	160 (5)	32	192
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	96 (3)	32	128
Seni dan Budaya**: Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari	96 (3)	32	128
Bahasa Inggris	64 (2) ***	-	64 ***
Muatan Lokal	64 (2) ***	-	64 ***
Total ****	928 (29)	224	1152

Keterangan:

- * Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
- ** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari).
- *** Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
- **** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

7. Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Sebelumnya
 Persamaan dan perbedaan antara Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat adalah sebagai berikut:

a. Kerangka Dasar Kurikulum

Kurikulum 2013 dan kurikulum darurat hanya menekankan pada materi pembelajaran dan sedikit penekanan pada karakter. Sedangkan pada kurikulum merdeka terdapat alokasi waktu sendiri yang diambil dari waktu jam mata pelajaran untuk mengembangkan karakter dan profil pelajar Pancasila. Hal inilah yang menjadi perbedaan kerangka antara ketiganya. Adapun kesamaan dari ketiganya adalah memiliki kerangka dasar yang mengacu pada tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan.⁶¹

b. Dimensi Kompetensi

- 1) Kurikulum 13 memiliki dimensi kompetensi yang dituju, yaitu Kompetensi Dasar (KD) yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada empat Kompetensi Inti (KI) yaitu: Sikap Spintual, Sikap Sosial, Pengetahuan, dan Keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan pertahun. KD pada KI 1 dan KI 2 hanya terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

⁶¹ A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, (Tasikmalaya: CV. Pustaka Turats Press, 2022), 11.

- 2) Kurikulum Darurat memiliki kompetensi yang sama dengan Kurikulum 2013, hanya saja ada sedikit penyederhanaan Kompetensi Dasar (KD) oleh Pemerintah agar berfokus pada kompetensi esensial.
- 3) Kurikulum Merdeka memiliki kompetensi tujuan yaitu, Capaian Pembelajaran atau CP yang disusun per fase. Capaian Pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Ada tujuh fase yaitu Fase A (umumnya setara dengan kelas I dan II SD), Fase B (umumnya setara dengan kelas III dan IV SD), Fase C (umumnya setara dengan kelas V dan VI SD), Fase D (umumnya setara dengan kelas VII, kelas VIII dan kelas IX SMP), Fase E (umumnya setara dengan kelas X SMA dan SMK), Fase F (umumnya setara dengan kelas XI dan XII SMA dan kelas XI dan XII dan/atau kelas XI, XII, dan XIII SMK).⁶²

c. Dimensi Struktur Kurikulum

- 1) Struktur Kurikulum 2013: Menggunakan Jam Pelajaran (JP) yang diatur per pekan. Satuan pendidikan mengalokasikan waktu pembelajaran secara rutin setiap pekannya dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran.
- 2) Struktur Kurikulum Darurat: Menggunakan Struktur Kurikulum pada Kurikulum 2013
- 3) Struktur Kurikulum Merdeka: Struktur kurikulum pada kurikulum merdeka dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu: 1) Pembelajaran reguler atau kegiatan intrakurikuler, dan 2) Kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jam Pelajaran (JP) diatur pada awal tahun ajaran. Satuan pendidikan diberi hak leluasa untuk mengatur alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai JP yang

⁶² A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, 11.

ditetapkan.⁶³

d. Dimensi Pembelajaran

- 1) Pembelajaran Kurikulum 2013: Pendekatan Saintifik merupakan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada kegiatan tatap muka di kelas. Adapun untuk kegiatan luar kelas ko-kurikuler tidak diwajibkan dan diserahkan kepada kreativitas guru pengampu, sehingga pelaksanaannya kurang maksimal.
- 2) Pembelajaran Kurikulum Darurat: karena kurikulum ini merupakan peralihan pada masa Covid-19 maka pembelajarannya disederhanakan dan hanya materi esensial sehingga guru dan peserta didik tidak terbebani untuk menyelesaikan seluruh materi pelajaran dan orang tua dipermudah dalam pendampingan pembelajaran di rumah.
- 3) Pembelajaran Kurikulum Merdeka: Menggunakan pendekatan diferensial sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler (sekitar 70-80% dari jam pelajaran) dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila (sekitar 20-30% jam pelajaran).⁶⁴

e. Dimensi Penilaian

- 1) Penilaian Kurikulum 2013: Penilaian pada kurikulum ini menggunakan penilaian formatif dan sumatif yang berfungsi untuk melihat perkembangan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 2) Penilaian Kurikulum Darurat: sama dengan Kurikulum 2013.
- 3) Penilaian Kurikulum Merdeka: Istilah penilaian pada kurikulum ini diganti dengan istilah asesmen. Pada kurikulum ini terdapat dua asesmen dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Asesmen formatif

⁶³ A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, 12.

⁶⁴ A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, 14.

adalah penilaian untuk mengukur keberhasilan proses belajar sehingga hasil asesmen ini dapat digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Asesmen Sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran, seperti akhir semester dan akhir tahun.⁶⁵

f. Dimensi Perangkat Kurikulum

- 1) Perangkat Kurikulum 2013: Pedoman implementasi kurikulum, Panduan Penilaian, dan Panduan Pembelajaran setiap jenjang.
- 2) Perangkat Kurikulum Darurat: sama dengan Kurikulum 2013
- 3) Perangkat Kurikulum Merdeka: Panduan Pembelajaran dan Asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan Program Pembelajaran Individual, modul layanan bimbingan konseling.⁶⁶

E. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam terdiri dari tiga kata yaitu Pendidikan, Agama dan Islam. Pendidikan berasal dari kata dasar didik yaitu memelihara atau memberi latihan.⁶⁷ Sedangkan kata agama berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti *a* = tidak, *gama* = pergi. Jadi agama artinya "tidak pergi, tetap di tempat, diwariskan secara turun temurun". Adapun Islam berasal dari Bahasa Arab yaitu *salima-aslama-islaman* yang berarti "Selamat, damai, pasrah dan berserah diri".⁶⁸

Menurut para ahli, terdapat beberapa pendapat tentang definisi Pendidikan Agama Islam, antara lain sebagai berikut:

⁶⁵ A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, 15.

⁶⁶ A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, 16.

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 353.

⁶⁸ Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Palangka Raya: CV. Narasi Nara, 2020), 9.

- a. Pendidikan Agama Islam adalah proses pendidikan yang bertumpu pada penataan generasi muda untuk dapat berperan dalam pengetahuan serta memiliki nilai-nilai Islam yang dapat diamalkan di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Hal ini disampaikan oleh Hasan Langgulung yang dikutip oleh Abdullah Hasan.⁶⁹
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa, Pendidikan Islam merupakan usaha dalam membentuk dan mengajak manusia supaya berani melangkah kedepan dengan landasan nilai Islam sehingga menjadikan manusia itu menjadi sebaik-baiknya manusia. Definisi ini menjelaskan tiga unsur pokok dalam pendidikan Islam, yaitu 1) Cakupan usaha dalam pendidikan islam didalamnya terdapat usaha pengembangan, pembentukan serta ajakan peserta didik untuk lebih maju dari kehidupan sebelumnya. 2) Pendidikan islam tidak hanya sekedar meraih kecerdasan semata, melainkan harus meliputi nilai-nilai akhlak yang luhur dan mulia. Jadi, siswa siswi pendidikan islam selain cerdas dan pintar harus berbudi akhlak luhur. 3) Upaya pendidikan islam menjadikan potensi kognitif (akal), afektif (perasaan) dan psikomotorik (perbuatan) sebagai asset yang dikembangkan.⁷⁰ Pendapat ini disampaikan Muhammad Fadhil al-Jamali yang dikutip oleh Afifuddin Harisah.
- c. Pendapat terahir diungkapkan oleh Al-Syaibaniy yang dikutip oleh Asrori dan Rusman, menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya mengarahkan pribadi dan kebiasaan seseorang sehingga berperilaku baik secara individu dan bermasyarakat. Upaya tersebut diterapkan melalui metode pembiasaan, pengajaran serta pendidikan.⁷¹

Dari berbagai pendapat di atas maka penulis menyimpulkan, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha membentuk perilaku dan sikap yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan pendidikan memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan pengajaran. Definisi di atas dapat dimengerti bahwa jangkauan pendidikan Agama Islam

⁶⁹ Abdullah B, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2018), 33.

⁷⁰ Afifuddin Harisah, *Filsafat Pendidikan Islam: Prinsip dan Dasar Pengembangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 31.

⁷¹ Asrori dan Rusman, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), 75.

sangatlah luas, yakni sampai pada pembentukan intelegensi, karakter dan kepribadian. Disamping itu pendidikan Agama Islam mempunyai tujuan untuk membentuk manusia berkepribadian muslim yang berkepribadian sosial yang baik penuh dengan nilai akhlak yang diridloi oleh Allah SWT.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan Pendidikan Agama Islam secara garis besar adalah mewujudkan insan kamil dan membentuk kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya merealisasikan atau mencenninkan ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat serta mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dan mencapai keridloan Allah SWT.

Sedangkan menurut para ahli, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ahmad D. Marimba tujuan terakhir Pendidikan Agama Islam ialah terbentuknya kepribadian Muslim.⁷²
- b. Menurut Sahal Mahfudh, tujuan pokok pendidikan agama Islam adalah mempersiapkan peserta didik agar mampu menjadi khalifah Allah yang akram (mulia) yang berarti lebih bertaqwa kepada Allah dan shahih dalam arti mampu mengelola, mengembangkan dan melestarikan alam.⁷³
- c. Menurut Widodo Supriyono, tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk dan memperkembangkan manusia beriman, bertaqwa, berilmu, bekerja dan berakhlak mulia di sepanjang hayatnya menurut tuntunan Islam.⁷⁴

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh perbuatan mausia. Adapun ruang lingkup pendidikan Agama Islam meliputi:

⁷² Ahmad. D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hlm. 49.

⁷³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, LIdS, Yogyakarta, 2004, hlm. 316.

⁷⁴ Widodo Supriyono "Ilmu Pendidikan Islam Teoretis dan Praktis, dalam Ismail SM dkkEditor, *Paradigma Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 41.

a. Tauhid

Tauhid sering disebut dengan aqidah dan iman. Iman adalah: membenarkan dalam hati atau percaya. Pendidikan keimanan di dalam Islam bersifat dinamis. Pertumbuhan iman dapat berproses melalui sentuhan kandungan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis (*al-ayat al-makhtubah*) maupun yang terbentang di jagat raya (*al-ayat al-kauniyah*) yang dibaca dengan berbagai pengetahuan, dapat pula melalui ibadah-ibadah praktis yang difardukan dan akhlak sosial yang dilaksanakan individu di dalam masyarakat Islam. Dengan demikian pendidikan keimanan merupakan bagian dasarnya di dalam pendidikan Islam yang melandasi semua bagian lainnya.⁷⁵

Keimanan yang pertama kali wajib diyakini oleh setiap Muslim adalah enam rukun iman, yaitu : (1) Percaya kepada Allah, (2) Percaya kepada Malaikat, (3) Percaya kepada Kitab, (4) Percaya kepada Rasul, (5) Percaya kepada hari Kiamat, (6) Percaya kepada takdir baik maupun buruk.

b. Ibadah

Ibadah secara bahasa berarti taat, menurut, mengikut dan tunduk. Tetapi arti secara istilah adalah segala ketaatan yang semata-mata karena mencari keridhaan Allah.⁸⁰ Ibadah yang khusus merupakan cara mengatur manusia dengan Tuhannya. Hal tersebut telah terumuskan dalam lima rukun Islam, yaitu: (1) Syahadat, (2) Shalat, (3) Zakat, (4) Puasa, (5) Haji.⁷⁶

c. Akhlak

Akhlak adalah merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dinukil oleh Nasruddin Razak, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, dari padanya timbul perbuatan yang mudah, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Sedangkan akhlak Islam adalah sikap mental dan laku perbuatan yang luhur yang mempunyai hubungan dengan Zat Yang Maha Kuasa

⁷⁵ Hery Noer Aly dan Mundzier S, *Wolak Pendidikan Islam*, Friska Agung Insani, Jakarta, 2000, hlm. 76.

⁷⁶ Hasbi Ash Shidieqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah*, Pestaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 5.

dan merupakan produk dari keyakinan atas kekuasaan dan keesaan Allah, yaitu jiwa tauhid".⁷⁷

Menurut Direktorat Jenderal Mandikdasmen, ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya Adapun ruang lingkup Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar meliputi aspek: (1) Al-Qur'an dan Hadits, (2) Aqidah, (3) Akhlak, (4) Fiqih, (5) Tarikh dan Kebudayaan Islam.⁷⁸

F. Kesiapan Guru dalam Pengimplementasian Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan suatu perubahan yang salah satu faktor perubahannya adalah adanya wabah penyakit yang bernama COVID-19 yang mengakibatkan seluruh aktifitas manusia terganggu dan diharuskan seluruh penduduk dunia tidak boleh keluar rumah dan harus tetap didalam rumah, tak pelak dunia pendidikan pun harus beradaptasi akan keadaan tersebut termasuk di Indonesia yang mewajibkan proses kegiatan belajar mengajar berlangsung secara jarak jauh/daring (online). Hal ini menuntut dari berbagai elemen pendidikan untuk beradaptasi dengan hal tersebut, hingga melahirkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka.

Berbagai faktor yang menjadikan kurikulum merdeka menjadi sebuah tonggak kelancaran serta kesuksesan pendidikan yang bisa menghasilkan siswa yang terdidik dan terpelajar, oleh karena itu institusi pendidikan ditantang untuk mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan tepat. Salah satu faktor yang menjadi kunci sukses dalam implementasi kurikulum merdeka adalah kesiapan guru. Kesiapan guru merupakan kunci

⁷⁷ Hasbi Ash Shidieqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah*, Pestaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 39.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Tingkat SD Mata pelajaran Agama Islam*, Direktorat Jenderal Mandikdasmen, Jakarta, 2007, hlm. 2.

sukses yang kedua setelah kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, karena berhasil dan tidaknya peserta didik dalam belajar merupakan kewajiban guru. Guru wajib memahami konsep dan tujuan dari kurikulum merdeka. Sangat sulit dalam penerapannya jika guru tidak memahami bahkan tidak siap dalam menjalankan kurikulum merdeka. Dalam hal ini guru-guru yang bertugas di daerah dan pedalaman akan sulit mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat, apalagi dengan pendekatan diferensial yang memerlukan waktu untuk memahaminya.⁷⁹

Pada penerapan kurikulum merdeka terdapat banyak komponen kesiapan bagi guru agar dikatakan siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Pada saat ini masih banyak guru yang bingung untuk menerapkan kurikulum merdeka, senantiasanya guru perlu mengetahui apa saja kesiapan yang dibutuhkan pada saat menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada proses pembelajaran di sekolah, hingga bentuk penilaiannya yang seperti apa. Kurikulum merdeka berujuan membentuk pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kompetensi siswa serta mengubah pola pendidikan dari pembelajaran yang hanya mementingkan hasil nilai ujian ke materi pendidikan sebagai proses, melalui pendekatan diferensial yang mengembangkan potensi anak sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Oleh karena itu, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik, agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi, dan kebenaran secara ilmiah. Dalam kerangka inilah perlunya kreativitas guru, agar mereka mampu menjadi fasilitator, dan Mitra belajar bagi peserta didik. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar (*facilitate learning*) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka, rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era

⁷⁹ Nurul Hikmah, *Kurikulum Merdeka Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 50.

globalisasi yang penuh berbagai tantangan.⁸⁰

Selain kreatifitas guru sebagai kesiapan dalam implementasi kurikulum merdeka, adalah adanya sosialisai kurikulum merdeka. Sosialisasi dalam implementasi kurikulum merdeka sangat penting dilakukan, agar semua pihak yang terlibat dalam implementasinya di lapangan faham dengan perubahan yang harus dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan.⁸¹

Setelah adanya sosialisasi, yang tidak kalah penting dalam implementasi kurikulum merdeka adalah partisipasi warga sekolah, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah dalam memberdayakan seluruh warga sekolah, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia. Dalam hal ini, peningkatan produktifitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku tenaga kependidikan di sekolah melalui aplikasi berbagai konsep dan teknik manajemen personalia.

Dengan demikian, kesiapan guru sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka, mengingat guru adalah pelaku utama di lapangan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, selain kepemimpinan kepala sekolah, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif, dan partisipasi warga sekolah.

Kurikulum memiliki fungsi dalam pendidikan, yaitu sebagai alat dalam proses pencapaian tujuan Pendidikan. Kurikulum memiliki komponen kunci dan komponen pendukung yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen kurikulum merupakan suatu sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan yang mencerminkan satu kesatuan yang utuh. Komposisi kurikulum merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Kurikulum memiliki empat komponen utama: tujuan, materi, strategi pembelajaran dan penilaian. Salah satu indikator kesiapan guru dalam penerapan kurikulum merdeka yaitu guru memahami kerangka dasar kurikulum merdeka yang tersaji di bawah

⁸⁰ Yuni Pratikno, Eric Hermawan, dan Antoni Ludfi Arifin, “*Human Resource ‘Kurikulum Merdeka’ from Design to Implementation*,” Jurnal Iqra’ 7, No. 1, (2022), 329.

⁸¹ Sumarsih dkk., “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar.” 45.

ini:⁸²

1. Guru memahami kerangka dasar kurikulum merdeka.

Kerangka dasar kurikulum merdeka yang tertinggi adalah tujuan pendidikan nasional yang sudah terintegrasi dengan Profil Pelajar Pancasila dari sini diturunkan Standar kompetensi lulusan kemudian dijabarkan ke dalam standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Dari ketiga standar ini diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asamen. Ketiga dokumen dari pemerintah pusat ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.

Sekolah harus memahami struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib serta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambah muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Pembelajaran dibagi menjadi dua: (1) Intra kurikuler yaitu Pembelajaran utama yang rutin dilakukan; (2) Ko kurikuler yaitu Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya Profil Pelajar Pancasila. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila.

2. Menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran (TP) dan alur tujuan pembelajaran (ATP).⁸³

Tujuan Pembelajaran merupakan hal yang hendak dicapai pada sebuah kegiatan pembelajaran, Tujuan Pembelajaran (TP), terdiri dari:

- a. Kompetensi → kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik
- b. Konten → ilmu pengetahuan inti / konsep utama

Alur Tujuan Pembelajaran merupakan sebuah rencana

⁸² Ari Gunawan, *Implementasi dan Kesiapan Guru IPS Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar*, Jurnal Manajemen organisasi dan bisnis: Volume 11 (2022), 27.

⁸³ Ari Gunawan, *Implementasi dan Kesiapan Guru IPS Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar*, Jurnal Manajemen organisasi dan bisnis: Volume 11 (2022), 27

yang disusun untuk mencapai pada sebuah tujuan. Kriteria Alur Tujuan Pembelajaran (ATP):

- 1) Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai
- 2) ATP dalam 1 fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear
- 3) ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase.

Selanjutnya guru dapat Merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP sebagai berikut:

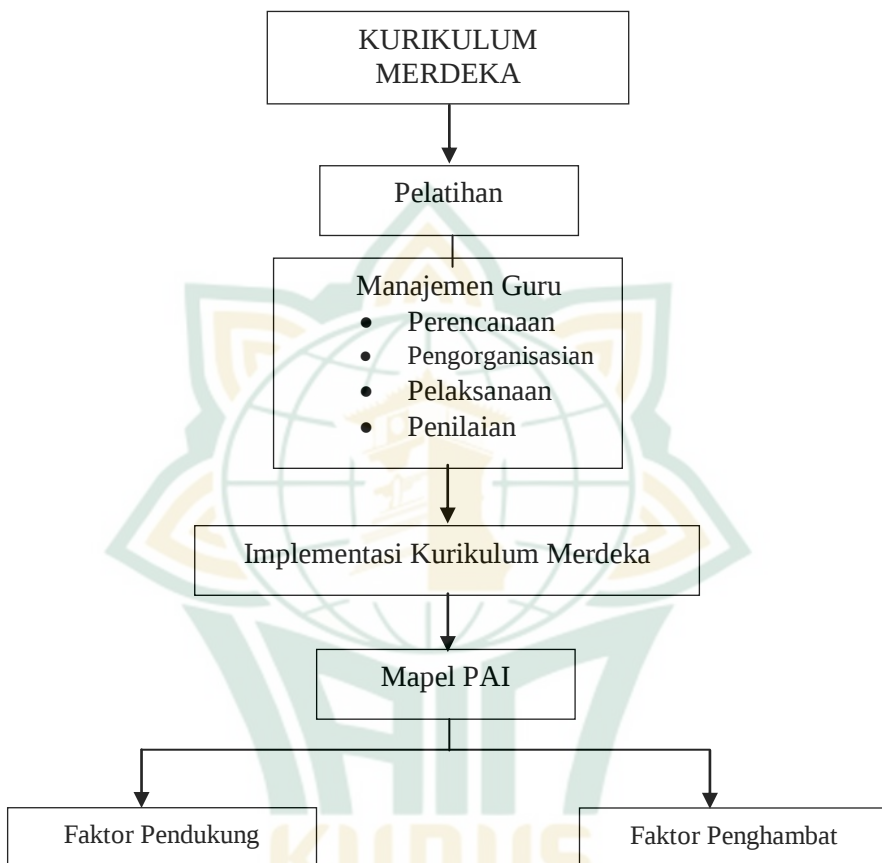
- 1) Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP
- 2) Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber → catatan penting: KepSek/Guru mampu memahami kalimat tersebut.
- 3) Identifikasi dimensi Profil Pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Tidak hanya itu guru juga harus mampu menyiapkan beberapa hal terkait konsep pelaksanaan kurikulum merdeka

- 1) Pelaksanaan Asesmen pengganti USBN
- 2) Kesiapan Rencana AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) dan Survei Karakter Pengganti UN.
- 3) Kesiapan Pelaksanaan PPDB Zonasi



G. Kerangka Berpikir



Pengembangan Kurikulum Merdeka merupakan langkah lanjutan dari Pengembangan Kurikulum 13 dan Kurikulum Darurat, yang kedua kurikulum tersebut telah dijalankan pada akhir tahun 2019 semenjak adanya pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka dirancang dengan tujuan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran pasca pandemi sekaligus mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui platform merdeka belajar sehingga menjadikan pelajar Indonesia memiliki profil pelajar pancasila yang beriman taqwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong serta berkebinekaan global. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Keberhasilan kurikulum merdeka dalam menjadikan pelajar yang nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu diantara kunci sukses dalam implementasi kurikulum merdeka adalah manajemen guru. Manajemen guru merupakan kunci sukses yang kedua setelah kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Kurikulum merdeka akan sulit dilaksanakan di berbagai daerah jika sebegini besar guru belum siap dalam manajemen. Ketidaksiapan guru itu tidak hanya terkait dengan urusan kompetensinya, tetapi berkaitan dengan masalah kreatifitasnya, yang juga disebabkan oleh rumusan kurikulum yang lambat disosialisasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini guru-guru yang bertugas di daerah dan pedalaman akan sulit mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat, apalagi dengan pendekatan tematik integratif yang memerlukan waktu untuk memahaminya.

Kurikulum merdeka yang berbasis pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik sesuai dengan keinginannya, antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil nilai dan materi ke pendidikan sebagai proses yang lebih merdeka dan menyenangkan, melalui pendekatan diferensial. Oleh karena itu, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik, agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi, dan kebenaran secara ilmiah.

Dalam kerangka inilah perlunya kreatifitas guru, agar mereka mampu menjadi fasilitator, dan mitra belajar bagi peserta didik. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar (*facilitate learning*) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan.

Selain kreatifitas guru sebagai kesiapan dalam implementasi kurikulum merdeka, adalah adanya sosialisasi kurikulum merdeka. Sosialisasi dalam implementasi kurikulum merdeka sangat penting dilakukan, agar semua pihak yang terlibat dalam implementasinya di lapangan, faham dengan perubahan yang harus dilakukan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing, sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan.

Setelah adanya sosialisasi, yang tidak kalah penting dalam implementasi kurikulum merdeka adalah partisipasi warga sekolah, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah dalam memberdayakan seluruh warga sekolah, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia. Dalam hal ini, peningkatan produktifitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku tenaga kependidikan di sekolah melalui aplikasi berbagai konsep dan teknik Manajemen personalia. Dengan demikian, kesiapan guru sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka, mengingat guru adalah pelaku utama di lapangan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, selain kepemimpinan kepala sekolah, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif, dan partisipasi warga sekolah. Dalam implementasi kurikulum merdeka, diperlukan kesiapan manajemen, diantaranya guru harus merancang pembelajaran efektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter dan menetapkan kriteria.